

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 1998 yang menjadi tanda berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto, memiliki implikasi luas terhadap kehidupan politik di negeri ini. Salah satu implikasi dari masa transisi ini yakni terbukanya saluran-saluran demokrasi melalui munculnya partai-partai baru. Partai-partai baru inilah yang nantinya akan berkompetisi pada pemilu 1999. Berdasarkan data yang tercatat oleh departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia¹ terdapat 141 partai politik yang didirikan menjelang pemilu 1999. Meskipun yang bisa mengikuti pemilu hanya 48 partai.

Kemunculan partai politik di Indonesia selain didorong oleh iklim demokrasi, partai-partai yang lahir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan ini juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Furnivall, masyarakat Indonesia atau Hindia-Belanda ketika itu, merupakan masyarakat plural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hanya saja, diantara mereka itu tidak pernah bertemu di dalam suatu unit politik. Meskipun demikian, realitas masyarakat Indonesia yang plural itu tidak sedikit memberikan kontribusi bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multipartai.²

¹ Julia I Suryakusuma, *Almanak Parpol Indonesia*, dalam Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; konsolidasi demokrasi pasca orde baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), 60.

² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; konsolidasi demokrasi pasca orde baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), 61.

Firmanzah berpendapat bahwa demokrasi liberal yang memungkinkan diadopsinya sistem multipartai dengan multi-ideologi menyebabkan paling tidak muncul tiga kekuatan utama pada pemilu 1999, yakni nasionalis sekuler, nasionalis radikal, dan nasionalis agama. Ideologi nasionalis-sekuler diwakili PDIP dan Partai Golkar, nasionalis-radikal diwakili PRD, dan nasionalis-agama diwakili PPP, PBB, dan PKS. Sedangkan PAN atau PKB dalam *platform* kepartaiannya mencap dirinya sebagai nasionalis tetapi jika dilihat dari basis massa akan kesulitan apabila dilepas dari hubungannya dengan kelompok Islam. Citra PAN sebagai tempat aspirasi warga Muhammadiyah dan PKB sebagai tempat aspirasi warga NU menjadi alasan utama bahwa kedua partai tersebut masih dikategorikan sebagai partai dari kelompok Islam.³

Berkembangnya sistem multipartai di Indonesia, sehingga memberikan peluang besar untuk organisasi-organisasi sosial berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Salah satu organisasi sosial yang menyambut diterapkannya sistem multipartai ini adalah Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah diniyyah*)⁴ yang didirikan oleh para ulama di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1926, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir NU.

Warga NU itu mempunyai 'nafsu' bahkan 'syahwat' politik yang cukup besar. *Khittah* 1926 sebenarnya bagian dari sikap politik warga NU untuk menyasati keadaan saat itu. Ketika Soeharto lengser, nafsu politik itu tercurah

³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: YOI, 2010), 89-90.

⁴ Tujuan didirikannya NU sebagai berikut;.....

dalam keinginan membuat partai. Saya ingat betul, dalam pertemuan pertama di Rembang yang digelar sekitar setengah bulan setelah Soeharto lengser, ulama dan tokoh NU dari semua aliran hadir disana.⁵

Ketersebaran elit NU di era multipartai, bisa kita lihat ketika PKB resmi didirikan dan bahkan resmi menjadi wadah aspirasi warga nahdliyin. Bersamaan dengan hal itu ada beberapa elit nahdliyin yang tidak sepaham dengan azas PKB dan kekecewaan dari sikap yang telah diambil oleh PBNU hingga mendirikan partai sendiri. Bahrul ulum menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan berdirinya partai-partai politik NU selain PKB⁶; *pertama*, menurut KH. Syukron Makmun (ketua umum PNU). Berdirinya PNU adalah untuk mewadahi aspirasi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, sesuai dengan misi yang diperjuangkan NU sejak lahirnya. Karena itu wajar bila kelompok Islam Ahlussunnah wal Jama'ah mendirikan partai untuk ikut memikirkan nasib bangsa ini.

Kedua, menurut H.M. Yusuf Hasyim (ketua umum PKU). Berdirinya PKU adalah wujud kekecewaan terhadap PKB, ia menegaskan bahwa legitimasi tunggal yang diberikan PBNU kepada PKB menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid tidak mau mendengarkan aspirasi warga NU secara menyeluruh. Selain itu Yusuf Hasyim juga menilai bahwa penyusunan pengurus PKB terkesan kurang akomodatif terhadap komponen-komponen NU. Dia juga mengatakan, masuknya beberapa kerabat dan orang dekat Abdurrahman Wahid serta putra Kyai Kholil Bisri, PKB terkesan tidak bebas dari nepotisme-suatu hal yang bertentangan dengan

⁵ KH. Yusuf Muhammad, dalam Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU dibodohi; jejak langkah NU era reformasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 8.

⁶ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU atau NU dibodohi; jejak langkah NU era reformasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 177-178.

semangat reformasi. Salahuddin Wahid yang juga merupakan tokoh pendiri PKU menambahkan bahwa berdirinya PKU adalah tuntutan keadaan, akibat politik Abdurrahman Wahid yang kontroversial. Pendirian PKB itu merupakan eksperimen politik Abdurrahman Wahid yang kontroversial.

Ketiga, menurut Abu Hasan (ketua umum partai SUNI). Berdirinya partai SUNI adalah sebagai upaya untuk menunjukkan identitas Ahlussunnah wal Jama'ah. Abu Hasan menolak asumsi yang mengatakan, bahwa pendirian partai SUNI terkait erat rivalitasnya dengan Abdurrahman Wahid dalam bursa pencalonan ketua Umum Tanfidziyah NU pada Muktamar ke-29 di Cipasung.

Dalam konteks kebijakan normatif yang mengatur relasi NU dan PKB, Ketika dihubungkan dengan konteks politik praksis keterlibatan warga NU secara umum akan nampak “kabur”. Keterlibatan tokoh-tokoh dan kader nahdliyin dalam mengurus kelahiran PKB dan sampai pada tataran tertentu. Meminjam istilah Syamsudin Haris bisa dikatakan “*Berjaya secara politik*”.⁷ Keterlibatan warga nahdliyin dalam politik praktis semakin tampak jelas ketika menghadapi pemilu 1999. Sebagai bukti bahwa NU ormas terbesar dengan jumlah jama'ah kurang lebih 40 juta orang, mampu mengantarkan PKB di tingkat nasional dengan perolehan suara peringkat ke tiga setelah PDIP dan Golkar.

Keterlibatan elit nahdliyin dalam politik praktis memang suatu hal yang tidak terelakkan, sebagaimana yang terjadi pada Gus Dur. Pada awal berdirinya PKB, Gus Dur sedang menjabat ketua umum PBNU. Namun pada waktu PKB lahir

⁷ Syamsuddin Haris, *NU dan Politik; perjalanan mencari identitas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 41.

Gus Dur juga menjabat sebagai ketua dewan syuro. Peran elit nahdliyin yang terlibat didalam partai politik tidak dibarengi dengan manajemen internal yang baik dalam artian mengupayakan dan memastikan supaya warga nahdliyin tetap di satu gerbong yang sama yakni PKB. Maka pada era kekinian berdampak pada afiliasi politik masing-masing elit.

Pada perkembangannya, fragmentasi kekuasaan di partai politik tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan internal parpol. Sebagai Indikatornya, manajemen internal partai politik dan manajemen keuangan yang tidak dikelola secara professional. Sehingga mengakibatkan munculnya friksi di internal parpol dan mengakibatkan konflik. Ini menjadi awal perpindahan parpol. Friksi dan konflik internal di partai inilah yang menjadi salah satu faktor perpindahan partai politik.

Keterlibatan elit nahdliyin di tingkat nasional didalam politik praktis bisa kita identifikasi diantaranya adalah Choirul Anam (ketua umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama), Muhaimin Iskandar (ketua umum PKB), Yenni Wahid (PKBI). Akan tetapi yang akan diperbincangkan didalam penelitian ini bukan mereka elit nahdliyin yang menduduki posisi strategis dalam partai politik, melainkan para elit nahdliyin yang melakukan perpindahan partai politik. Elit nahdliyin dalam skala nasional yang pindah kendaraan politik diantaranya adalah; Efendi Choiri (Gus Choi) dan Lily Wahid (adik kandung Gus Dur)⁸. Gus Choi pada awalnya ada di

⁸<http://www.lensaIndonesia.com/2013/04/12/mantan-politisi-pkb-oke-oke-aja-yenny-moncer-demokrat.html>, (diakses 14 Mei 2013).

PKB kemudian pindah ke Hanura, begitu juga dengan Lily wahid yang berawal di PKB, namun pada saat ini dia lebih memilih di Hanura.

Syamsuddin Haris memberikan gambaran bahwa perpindahan partai politik ini disebabkan karena tidak adanya ikatan secara institusional antara para kandidat legislator dengan partai politik yang dinaunginya. Sehingga wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD serta kepala dan wakil kepala daerah dengan ringan langkah mundur di tengah masa jabatan mereka ataupun pindah partai politik tanpa merasa berdosa.⁹

Fenomena politisi pindah partai politik juga terjadi di Jawa Timur. Diantaranya adalah sosok Hasan Aminuddin, politisi ini adalah mantan Bupati Probolinggo, yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim¹⁰. Saat ini ia berpindah ke partai NasDem dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina DPW Partai NasDem. Selain itu, beberapa politisi yang pindah partai politik dengan tujuan sama yakni partai NasDem diantaranya adalah; mantan pengurus DPW PKB Jakfar Sodiq, Ketua Fatayat NU Jatim Farida, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ngawi Yayuk, dan mantan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Agus Supriyanto¹¹. Mereka ini bergabung dengan partai NasDem dan secara simbolis tercermin dari penyematan jaket, sebagai simbol bahwa mereka resmi bergabung dengan Partai Nasdem.

Dalam wilayah yang dijadikan konteks penelitian ini, fenomena politisi pindah partai politik juga terjadi. Akan tetapi hal itu sulit ditemukan dalam *publish*

⁹ Syamsuddin Haris, Opini Kompas 8 Mei 2013.

¹⁰ <http://www.liputanwinda.com/2013/04/hasan-aminuddin-siap-maju-sebagai-cagub.html> (diakses 14 April 2013).

¹¹ <http://lampost.co/berita/politisi-pkb-golkar-dan-pdip-pindah-ke-nasdem> (diakses 14 April 2013).

media, baik media cetak maupun media online. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, menjumpai perpindahan partai politik dikalangan elit nahdliyin Kabupaten Sidoarjo. Pada perjalanan selanjutnya dalam mencari data jumlah elit nahdliyin yang berpindah parpol, belum menemukan data yang akurat terkait jumlah elit nahdliyin yang berpindah parpol.

Fenomena politisi pindah partai politik yang telah dipaparkan diatas, membawa peneliti tertarik untuk meneliti perpindahan partai politik yang terjadi di kalangan elit nahdliyin. Akan tetapi, peneliti akan membawa pada wilayah kajian yang lebih mikro yakni politisi NU Sidoarjo. Berkaitan dengan pemilihan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokus penelitian diantaranya; *pertama*, Sidoarjo merupakan Kabupaten yang berada dalam wilayah Jawa Timur. Di provinsi inilah NU lahir dan berkembang sekaligus sebagai basis riil NU.¹² Jumlah warga NU Kabupaten Sidoarjo setidaknya tercatat 400.000 jiwa, dalam acara pembuatan kartanu.¹³ Jumlah warga NU itu tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, penelitian dengan tema Nahdlatul Ulama-politik sudah banyak dilakukan, baik oleh para akademisi, penulis, pengamat, intelektual baik dalam maupun luar negeri. Tetapi kajian-kajian tersebut memiliki wilayah yang luas dan masih sedikit yang mengambil tema NU-Politik dalam wilayah regional. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks regional.

¹² Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa*, (151

¹³<http://www.lensaIndonesia.com/2012/10/16/pembuatan-kartanu-di-sidoarjo-diikuti-puluhan-ribu-warga-nahdliyin.html>, (diakses pada 27 Juni 2013, 02.00).

Politisi Dikalangan Elit Nahdliyin Kabupaten Sidoarjo yang berpindah partai politik, yang selanjutnya dijadikan fokus dalam penelitian ini. Setidaknya terdapat dua politisi yang pindah partai politik. *Pertama*, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pindah ke Partai Golongan Karya (Golkar). *Kedua*, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpindah ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Politisi yang pertama dengan inisial HUI, sedangkan yang kedua berinisial KNH.

Berangkat dari realitas di atas, bahwa fenomena perpindahan partai politik tidak hanya terjadi dalam tingkat nasional. Di tingkat regional, dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo fenomena tersebut juga kita jumpai. Lebih lanjut dalam wilayah yang akan dijadikan obyek studi dalam penelitian ini juga tidak luput dari adanya *trend* perpindahan partai politik dikalangan politisi Nahdlatul Ulama.

B. Rumusan Masalah

1. Apa motif elit Nahdliyin Kabupaten Sidoarjo berpindah partai?
2. Bagaimana model perpindahan partai politik para elit Nahdliyin Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan motif elit Nahdliyin Kabupaten Sidoarjo berpindah Partai.
2. Untuk menganalisa model perpindahan partai politik di kalangan elit Nahdliyin di Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegunaan

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu politik khususnya dalam studi partai politik. Disamping itu juga berguna untuk pengayaan teori dan konsep dalam wacana ilmu politik yang berkembang.

2. Praktis

Secara umum penelitian yang mengambil tema "*Perpindahan Partai Politik Di Kalangan Elit Nahdliyin*" bermanfaat bagi partai politik, sebagai masukan bagi para pemegang kuasa untuk memperbaiki tata kelola organisasi yang dipegangya.

E. Definisi Konsep

Judul skripsi ini terdiri dari beberapa istilah yang pengertian-pengertiannya perlu didefinisikan untuk dijadikan pedoman dan menghindari kerancuan pembahasan lebih lanjut.

Ada beragam istilah yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasionalnya, yaitu: *Pertama*, kata "fenomena". Fenomena dalam pengertian secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *phainesthai*, *phainomenon*

(menampakkan, memperlihatkan, apa yang tampak).¹⁴ Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksudkan adalah kejadian dalam ruang konstelasi praktik politik di Indonesia yang teramati panca indera kita.

Kedua, perpindahan partai politik adalah ketika seseorang pada waktu atau masa tertentu berdomisili dalam partai politik tertentu, kemudian dalam waktu yang berbeda atau dalam waktu yang sama dia di partai politik lain.¹⁵ Misalnya pada tahun 2009 ada dipartai "A", kemudian pada tahun 2014 ada dipartai "B".

Ketiga, Elite Nahdliyin dalam konteks penelitian ini adalah kelompok orang yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan atau berada dalam posisi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik.¹⁶ Keberpengaruhannya seseorang dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Putnam yakni; *Pertama* dia putra seorang kyai. Kyai merupakan tokoh dan atau pemegang keputusan sentral di dalam Nahdlatul Ulama. Ucapan dari seorang kyai di dalam tubuh NU bisa mewarnai aktivitas yang akan dilakukannya, bahkan fatwa seorang kyai mampu merubah sikap jajaran yang menduduki posisi struktural. Sehingga kedudukan kyai bukan hal yang *sepele*, oleh karena itu ketika kaum nahdliyin mengikuti fatwa-fatwa dari para kyai bukan hal yang aneh. Sebab kaum nahdliyin merupakan jama'ah yang berada dibawah Nahdlatul Ulama. Maka ketika seseorang yang menjalani takdir sebagai putra kyai memiliki pengaruh di lingkungannya yang dijadikan basis politiknya.

¹⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : PT Gramedia, 2005), 230.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 875.

¹⁶ TB. Bottomore, *Elit dan Masyarakat*. Terj Abdul Haris dan Sayid Umar, (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 200), 85.

Kedua, keberpengaruhan seseorang dalam kategori elit nahdliyin ini, tercermin ketika tokoh tersebut mencalonkan diri sebagai legislator. Yang ditandai dengan kemampuannya menggalang massa (konstituen) untuk mengantarkan mereka menduduki kursi parlemen.

Keempat, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten yang ada dalam wilayah administratif pemerintah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang dihimpit dua sungai, sehingga dikenal dengan kota delta. Batas wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelah utara berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, disebelah Timur berbatasan dengan laut yang dinamakan selat Madura, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil lacakan penulis Penelitian tentang NU sudah banyak dilakukan, baik oleh akademisi, penulis maupun pengamat. Adapun studi tentang NU yang pernah dilakukan adalah:

- 1) Skripsi dari **Achmad Azmi Musyaddad** (Program studi Ilmu Politik Fisip UNAIR, 2011), tentang *NU dan POLITIK*.

Penelitian ini menunjukkan pada kita bahwa PCNU Gresik menganggap *Khittah* NU tidak menghalangi NU berpolitik. Implementasi *Khittah* NU dimanifestasi dengan menempatkan kader NU sebagai Calon Bupati melalui Musyawarah Kerja II, hingga akhirnya terpilih Ketua PCNU Gresik sebagai calon Bupati dari NU. Bentuk keterlibatan PCNU Gresik

¹⁷ Daerah Dalam Angka Kabupaten Sidoarjo 2009, 3.

dengan melakukan konsolidasi internal jam'iyah lewat surat instruksi, pembentukan panitia Sembilan sebagai tim sukses NU, dan memanfaatkan gambar lambang serta asset NU *Khittah* NU menjadi alat legitimasi NU untuk berpolitik. Keputusan PCNU Gresik dalam mendukung pencalonan Ketua PCNU Gresik dipatuhi dan dijalankan oleh perangkat organisasi NU Gresik, sehingga tidak ada penolakan atau perbedaan pandangan diantara pengurus untuk mendukung Ketua PCNU sebagai calon Bupati dalam pemilukada Gresik 2010. PCNU Gresik menjadi elit yang keputusannya dipatuhi oleh seluruh perangkat organisasi NU di Gresik.

- 2) Penelitian dari **Sasmita Nurhadi** (Fakultas Satra Universitas Jember, 2007), tentang *KONFLIK ELIT LOKAL DI BANYUWANGI; Studi tentang Konflik Elit NU Di Banyuwangi Tahun 2002*.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa, ternyata munculnya konflik elite NU Banyuwangi pertama kali disebabkan oleh adanya keinginan para elite dalam kegiatan politik praktis, yakni dalam rangka pemilihan Ketua DPC PKB Banyuwangi pada arena Muscab 1 PKB Banyuwangi. Fenomena menarik dalam konflik tersebut adalah diluncurkannya isu etnis, yakni pertarungan antara kelompok kyai Madura dan kyai Jawa. Hal ini terutama berkaitan erat dengan karakteristik masyarakat Banyuwangi sebagai bagian dan lingkungan daerah Tapal Kuda yang sangat kental pengaruh budaya Jawa dan Madura. Pola ini yang menyebabkan konflik tersebut benar-benar sampai di tingkat paling bawah (masyarakat).

- 3) Tesis dari **Abdul Latif Najmuddin** (Program Studi Sosiologi Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana UGM, 2007), tentang *NU DALAM RUANG POLITIK; Khittah dan Persaingan Elit di Jember Pasca Orde Baru*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi pergeseran perilaku politik elit NU Jember dari politik moral yang berwawasan kebangsaan yang ditanamkan *khittah* ke arah politik praktis-pragmatis yang berorientasi kekuasaan semata. Dalam konteks demikian ini, aktor sosial NU Jember yang meliputi tokoh-tokohnya, kelompok muda terdidik dan para masa/umat NU Jember secara kolektif merespon perubahan peta-sosial politik bangsa era pasca Orde Baru dengan mendirikan dan mengembangkan partai politik (PKB). Namun demikian, peran yang dimainkan para aktor sosial kewargaan NU Jember tidaklah sama. Tokoh-tokoh NU Jember dikenal sebagai kelompok elit keagamaan yang memiliki peranan dominan dalam menentukan sikap dan tindakan politik NU Jember, sehingga timbul bermacam kepentingan dan menyebabkan persaingan antar elit NU dalam politik praktis. Persaingan, intrik, serta konflik yang terjadi akibat keterlibatan para elit NU Jember dalam politik, mendapatkan banyak kritikan dari kalangan NU Jember sendiri, mayoritas dari mereka berpendapat bahwa para elit NU Jember tidak konsisten dengan landasan politik yang ditanamkan oleh *khittah*.

- 4) Disertasi dari **Abdul Chalik** (Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), tentang *NAHDLATUL ULAMA PASCA ORDE BARU; Studi Partisipasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Jawa Timur*.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa *Pertama*, partisipasi politik yang dilakukan oleh elit NU Jawa Timur meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan baik dalam tingkat eksekutif maupun legislatif. *Kedua*, budaya politik elit NU Jawa Timur terbentuk oleh pergumulan budaya besar (mayor) dan kecil (minor) yang cukup panjang dan intens, baik berasal dari tradisi Islam maupun Kejawen. Hasil dari pertemuan ini, melahirkan beberapa varian subkultur di Jawa Timur, yakni; budaya pesisiran, Mataraman, Arek, Madura dan Pandalungan.

- 5) Penelitian dari Abdul Haris dkk (STAIN Jember Jawa Timur, 2002) tentang *Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru*.

Temuan dari penelitian ini bahwa tindakan NU Jember dalam melakukan persinggungan dengan persoalan politik praktis, mulai dari keterlibatannya dalam proses pembentukan PKB; mobilisir massa pada pemilu 1999 dalam rangka *back up* Abdurrahman Wahid; pemilihan Bupati Jember periode 2000-2005; dan pembentukan pemerintahan kota, merupakan fakta empirik yang menunjukkan terjadinya pergeseran perilaku politik kultural pada diri NU Jember pasca Orde Baru. Kalau sebelumnya aktivitas perpolitikan NU Jember lebih berorientasi kepada aspek kualitatif, kini (pasca pembentukan PKB) aktivitas perpolitikannya mulai mengalami

pergeseran orientasi kepada aspek kuantitatif dengan target turut terlibat dalam *power sharing*.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas, sudah banyak akademisi yang meneliti Nahdlatul Ulama. Tetapi studi-studi yang sudah dilakukan masih terfokus pada posisi NU sebagai organisasi sosial-keagamaan. Walaupun demikian studi yang akan penulis lakukan masih memiliki celah dari yang sudah-sudah dilakukan, karena studi yang akan dilakukan ini mengambil fokus "*Perpindahan Partai Politik Di Kalangan Elit Nahdliyyin*". Dari penelitian ini diharapkan akan melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan *case study*. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, obyek yang diteliti adalah manusia dengan perilaku politiknya. Perilaku politik masing-masing subyek memiliki makna yang berbeda dan tidak cukup dilihat sekasap mata. Sehingga perlu pengungkapan lebih dalam. *Kedua*, perpindahan sikap politik memiliki faktor yang sifatnya dinamis. Faktor-faktor tersebut pada masing-masing subyek masih berada dalam wilayah abstrak, sehingga tidak bisa sekali melihat lapangan kemudian mengkuantifikasikan.

Latar belakang itulah yang kemudian dijadikan pijakan untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diungkapkan Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif digunakan karena ia dapat mengungkap sesuatu di balik fenomena dan dapat menjelaskan data yang sulit dikuantifikasikan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dilakukan pada elit nahdliyin. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan basis massa Nahdlatul Ulama. *Kedua*, Sidoarjo dengan basis massa NU terbesar, memiliki *keunikan* tersendiri. Dimana *keunikan* tersebut di ekspresikan lewat sikap politik mereka. *Ketiga*, faktor efisiensi waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki peneliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehingga dalam rangka proses penghimpunan data saat terjun ke lokasi penelitian akan sangat menentukan proses data selanjutnya.

¹⁸ Juliet Corbin dan Staruss Anseln, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

Sumber utama ini adalah subyek yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Hal ini akan ditempuh melalui teknik observasi dan wawancara.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang sumber utama penelitian. Data sekunder ini akan diperoleh dari buku, jurnal, sumber online, dan dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini akan didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

a) Wawancara (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah komunikasi verbal antara peneliti dengan subyek penelitian untuk mendapatkan informasi penting sebagai data Penelitian.¹⁹ Penggunaan Wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) dalam penelitian ini adalah, untuk memperoleh data tentang motif yang mendasari perilaku politiknya dan bagaimana model perpindahan Partai Politik di Kalangan Elit Nahdliyin di Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan informan dalam penelitian ini akan didasarkan pada keterkaitan informan dengan tema yang dijadikan fokus penelitian ini. Dalam hal ini, teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*²⁰. Artinya, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan

¹⁹James A Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Enesco, 1992), 306.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 218.

tertentu. Sehingga peneliti menentukan informan yang dianggap mengetahui dan paham dengan tema penelitian ini.

Adapun subyek yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain. Politisi dengan inisial UIH, NH, dan HI. Politisi yang diberi inisial UIH ini adalah, seorang politisi yang mengawali karier politiknya melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun pada periode selanjutnya ia memilih keluar dari PKB dan bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Sedangkan informan kedua yang berinisial NH ini juga seorang politisi. Awal karier politiknya juga tidak jauh berbeda dengan informan pertama, yakni dimulai dari PKB. Akan tetapi pada periode selanjutnya ia masuk ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Selanjutnya subyek yang berinisial HI ini, politisi yang domisili partai pertamanya di PKB. Namun pada periode selanjutnya dia memilih transmigrasi ke Partai Golongan Karya (Golkar).

b) Dokumentasi

Selain penggunaan Teknik Wawancara dan Observasi. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi (data) yang berkaitan dengan sumber data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga sampai

menemukan titik kejenuhan data tersebut. Langkah-langkah analisis data Miles dan Huberman yaitu *data reduction, data display, dan conclusion*.²¹

a) Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait dengan tema yang dijadikan focus. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali apabila diperlukan.

b) Data Display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.

Penting untuk diingat bahwa dalam praktek penyajian data tidak semudah dengan ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis.

c) Conclusion/ verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

²¹ Sugiono., 246.

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini. Sebelum melakukan analisis terhadap temuan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan *cross-check* data secara bersilang antara data hasil wawancara, observasi serta data yang dihasilkan dari dokumentasi.²²

Oleh karena itu dalam melakukan *cross-check* temuan data, baik data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti melakukan verifikasi terhadap tiap temuan data tersebut dan juga mengkomparasinya dengan tujuan agar didapatkan data yang dapat diakui validitasnya. Verifikasi dan komparasi ini peneliti lakukan dengan menggunakan matrik triangulasi dengan melakukan kodifikasi pada data lapangan yang telah ditemukan melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

²²Matthew B Milles dan Michael A Huberman, *Qualitatif Data Analysis*, (California: Sage Publication, 1994), 266-267.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I (Pendahuluan) terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penelitian

Bab II (Kerangka Konseptual) yang terdiri dari 1) Teori Fenomenologi Alfred Scutz, 2) Teori Elit, 2) Konsep Ideologi Partai Politik di Indonesia.

Bab III (Setting Penelitian) yang terdiri dari Letak Geografis, Demografis, Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Aspek Keagamaan, Aspek Pendidikan, dan Aspek Politik.

Bab IV (Penyajian Data) yang terdiri dari A) Motif Perpindahan Partai Politik di Kalangan Elit Nahdliyin, B) Model perpindahan Partai Politik Di Kalangan Elit Nahdliyin.

Bab V (Penutup) yang berisi kesimpulan dan saran.